

**PENDAMPINGAN PENGELOLAAN AKUNTANSI MANAJEMEN
SCAFFOLDING PADA BUMDes “MULTI GUNA” DESA SIDOMULYO
BERIKAN WAWASAN KEPADA ANGGOTA DAN PENGURUS**

**Labbaika Dwi Ayu Rahmawati¹, Putri Nugrahaningsih², Denty Arista³, Zaim Arif Eko
Saputra⁴, Galuh Tiaramurti⁵
Universitas Sebelas Maret^{1,2,3,4,5}
Email: rahmawati26@staff.uns.ac.id**

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan penataan sumberdaya manusia serta manajemen pengelolaan, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pemahaman pengelolaan BUMDes “Multi Guna” Desa Sidomulyo terutama dari pengurus, rendahnya pemahaman manajemen usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer untuk menunjang pemasaran digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pembelajaran partisipatif dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan tata kelola manajemen usaha masyarakat baik dari segi pemasaran produk yang masih dilakukan secara konvensional beralih menerapkan teknologi informasi pasar digital.. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara diterukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes “Multi Guna” terutama dalam bidang pengelolaan akuntansi manajemen pasar, pengaruh peralihan lokasi pasar, dan kurangnya pelatihan dan pendampingan penggunaan digital marketing pasar. Perkembangan teknologi serta kurangnya perhatian pemerintah membuat keterlambatan kemajuan pasar Desa Sidomulyo.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Manajeemen, Teknologi

Abstract

This service aims to organize human resources and management, this is shown by the low understanding of the management of the "Multi-Purpose" BUMDes in Sidomulyo Village, especially from the administrators, the low understanding of business management, and the not yet optimal use of computer-based information technology to support digital marketing. The method used in this research is a qualitative descriptive method with participatory learning in the form of lectures, discussions, questions and answers, and practice. This is expected to improve community business management governance skills both in terms of marketing products which are still carried out conventionally by switching to implementing digital market information technology. Based on the results of discussions and interviews, it was revealed that there are still several obstacles faced by "Multi-Purpose" BUMDes, especially in in the field of market management accounting management, the influence of market location shifts, and the lack of training and assistance in using digital market marketing. Technological developments and lack of government attention have delayed the progress of the Sidomulyo Village market.

Keywords : Human Resources, Management, Technology

1. PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan strategi dan pelibatan masyarakat desa setempat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016). Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014). BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak pada bidang pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat (Amelia, 2014). Pada hakekatnya BUMDes didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Pada hakikatnya pengembangan desa merupakan sebuah upaya dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan serta pengembangannya (Coristya, 2010). Di dalam pengembangan desa diperlukan strategi untuk mencapai cita-cita yang berkemajuan dan tentunya berkelanjutan. Pemerintah telah membuat kebijakan mengenai pengalokasian dana desa yang cukup besar. Kebijakan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dengan perkembangan desa. Kebijakan pemerintah tersebut perlu diimbangi aksi nyata oleh berbagai pihak dan masyarakat. Perangkat desa tidak hanya melayani masalah administrasi warga tetapi harus berinovasi mengembangkan sumber daya desa.

Kepedulian terhadap keberlangsungan salah satu bentuk badan usaha yang menjadi salah satu objek penting masyarakat luas dalam pengembangan ekonomi yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) “Multi Guna”. Terletak pada Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Disini BUMDes “Multi Guna” memiliki 251,99 hektare yang terbagi dalam lahan bukan sawah, yaitu lahan untuk bangunan, rumah, pekarangan, lading, tegalan, huma, dan lainnya. Kemudian, seluas 155,99 hektare dan lahan sawah seluas 96 hektare (Laporan Desa 2018). BUMDes lahir sebagai salah satu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa

yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Desa Sidomulyo merupakan desa yang memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan manajemen BUMDes. Hal ini ditunjukkan dengan adanya usaha ekonomi kreatif yang tidak terakomodir dengan baik, sehingga dalam pertumbuhannya mengalami kembang kempis. Antara lain BUMDes Multi Guna memiliki lima unit usaha lain unit pertokoan ATK, unit fotokopi, unit parkir, unit sewa molen, dan unit sewa hantara scaffolding. Pada pengabdian ini mengfokuskan permasalahan pada unit pasar tradisional utama di Desa Sidomulyo. Para anggota pengelola BUMDes tidak terlalu mengetahui perihal sistematis pengelolaan keuangan yang benar dan mudah direalisasikan, kurangnya pengoptimalan dalam pengembangan usaha serta penerapan akuntansi BUMDes berbasis digital atau aplikasi berkaitan dengan pelaporan akuntansi yang masih kurang. Pemanfaatan teknologi ini sangat perlu diterapkan dalam pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mengembangkan BUMDes memerlukan tiga pilar utama, yaitu:

- 1) Pilar pertama bersifat kelembagaan dan bisnis, BUMDes mempunyai status hukum Undang-undang mendorong pembentukan unit-unit usaha berdasarkan potensi desa, menghubungkan usaha dengan potensi desa sehingga menjadi penggerak perekonomian desa.
- 2) Pilar kedua adalah akses keuangan, Optimalkan secara maksimal aktivitas perekonomian masyarakat desa melalui akses pembiayaan pada BUMDes.
- 3) Pilar ketiga adalah digitalisasi, selain berperan sebagai offtaker terhadap hasil produksi masyarakat desa, BUMDes juga memfasilitasi masyarakat desa untuk mengakses pasar melalui platform market place yang dikembangkan melalui ekosistem BUMDes yaitu BUMDes Online.

Terkait dengan ketiga pilar yang diperlukan dalam pengembangan BUMDes, maka digitalisasi keuangan dan pemasaran BUMDes sangatlah mendesak dan mendesak karena BUMDes mempunyai peran yang sangat strategis dalam memutar roda perekonomian desa.

Pembaharuan pengabdian terletak pada objek pengabdian dimana menjadi pengabdian yang mengambil tema mengenai pengelolaan akuntansi manajemen scaffolding pada BUMDes “Multi Guna”. Pengabdian ini berkontribusi pada identifikasi survey awal bagaimana penerapan pengelolaan akuntansi manajemen ada BUMDes, dimana pengelolaan akuntansi manajemen disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas unit badan usaha terkait. Letak pengabdian di antara pengabdian sebelumnya memberikan pengetahuan dan wawasan terkait pengelolaan akuntansi manajemen scaffolding pada suatu BUMDes.

Upaya pemberdayaan BUMDes merupakan representasi kebijakan pemerintah untuk melakukan pemerataan kegiatan ekonomi hingga pada tingkat pedesaan. UU No 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan payung hukum atas BUMDes selaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengabdian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menggali informasi untuk menemukan permasalahan yang dihadapi didalam implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 ayat 3 berbunyi tentang tujuan BUMDes adalah :

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi daerah
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelolan lumbung pangan desa
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa
4. Pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa

Tujuan akhir dari pembentukan BUMDes sebagai instrument modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Adapun Sayuti mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan (Sayuti, 2011). Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintergrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan.

Penting untuk diingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan dan kesepakatan Masyarakat luas (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi maupun konsumsi harus dilakukan secara professional dan mandiri (Rahardjo dan Ludigdo, 2006)

Sejalan dengan tujuan pembentukan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes didirikan atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa. Potensi

tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, karenanya panduan awal pembentukan dan pengelolaan BUMDes mesti tersedia. Peningkatan aktivitas usaha diperlukan kejelian pemerintah dalam pengembangan peluang atau bisnis yang ada di desa (Hamril, 2021). Dalam lingkup pemerintahan daerah, panduan pembentukan dan pengelolaan BUMDes dapat dituangkan dalam peraturan daerah. Sehingga dalam perspektif sosiologis guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepatuhan untuk menjalani aturan tersebut ditingkat daerah dapat lebih terjamin kepastiannya. Agar BUMDes dapat berkontribusi untuk meningkatkan PADes, maka perlu disusun sistem manajemen yang baik, khususnya sistem alokasi hasil usaha BUMDes.

Hasil usaha BUMDes diperoleh dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan serta kewajiban dan penyusutan asset tetap setiap tahunnya. Sistem alokasi hasil usaha tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Perhitungan alokasi hasil usaha tersebut harus dikelola melalui sistem akuntansi yang sederhana.

Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan kelembagaan merupakan unit terdepan Pembangunan kepada Masyarakat. Terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah yang harus diberdayakan dalam rangka pemberdayaan social ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa Masyarakat. Pemerintah yang juga berperan aktif juga dihadapkan dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yaitu sebagaimana berikut : Keadaan sumber daya alam (SDA), Kondisi sumber daya manusia (SDM), kemapanaan kelembagaan untuk pembangunan, Sarana dan prasarana untuk pembangunan, Kebijakan pembangunan, Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat (Mardikanto dan Soebianto dalam Larasati dan Ya'taufiq Kurrahman, 2019).

Sesuai dengan pemaparan diatas, perlu digaris bawahi bahwa tujuan tersebut dapat tercapai apabila memiliki sumber daya manusia yang handal, asset daerah yang terjamin kualitas nya, serta dukungan dari berbagai elemen terkait menentukan keberhasilan suatu BUMdes. Desa seharusnya juga menjadi wilayah awal yang menjadi penyalur perkembangan keberhasilan wilayah pusat. Melalui berbagai program elok yang berkembang seperti BUMDes mampu menghantarkan para wilayah pusat menjadi lebih baik akan penataan perekonomian daerah nya. BUMDes juga memerlukan masyarakat yang

selektif dan bergotong royong untuk mensejahterakan kepentingan bersama.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln, 1987 dalam Moloeng, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pembelajaran partisipatif dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan tata kelola manajemen usaha masyarakat baik dari segi pemasaran produk yang masih dilakukan secara konvensional beralih menerapkan teknologi informasi pasar digital. Pengabdian ini juga melalui identifikasi mendalam sekaligus diskusi kelompok focus (Focus Group Discussion) yang dimulai dari survey awal dengan observasi dan wawancara di BUMDes “Multi Guna” Desa Sidomulyo.



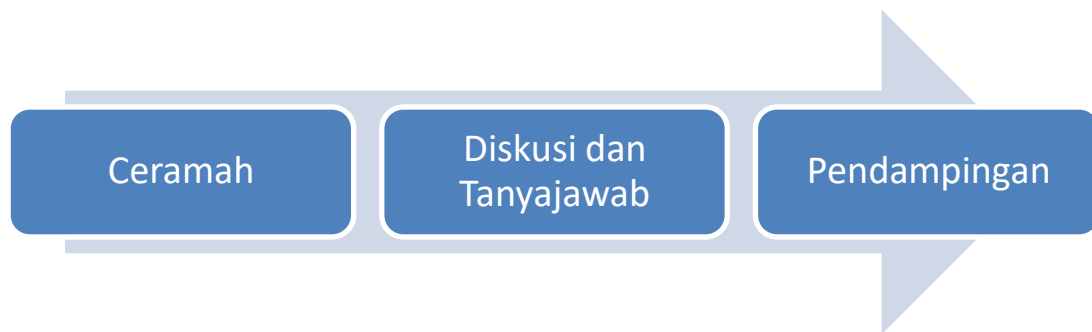
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program BUMDes sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengusung semangat gotong royong program BUMDes tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial. Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dalam aspek fisik memiliki obyek utama sarana, prasarana dan manusia misalnya pembangunan jalan desa, permukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah dan pendidikan (Muhi, 2011: 8 dalam Almasri dan Desmiwar). Sedangkan

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mewujudkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal dan digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Widjaja, 2005: 169, dalam Almasri dan Desmiwar).

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diterapkan dalam kegiatan pendampingan pengelolaan pada BUMDes “Multi Guna” dilaksanakan dengan mengangkat tema aspek akuntansi manajemen scaffolding pada BUMDes desa Sidomulyo Madiun pada tanggal 23 Juni 2023 secara luring. Jumlah partisipan yang menghadiri sekitar 15 orang yang diantaranya tim pengabdian, narasumber, ketua BUMDes “Multi Guna” Desa Sidomulti Madiun beserta jajarannya. Adapun rincian aktivitas dalam melaksanakan pengabdian sebagai berikut :

- Pertama, survei awal untuk mengetahui profil calon mitra / BUMDes “Multi Guna” Desa Sidomulyo. Kegiatan survey ini dilakukan untuk mengetahui secara detail dan rinci profil mitra, menggali permasalahan, mendiskusikan solusi pemecahan masalah, serta melakukan kesepakatan pelaksanaan program PKM HGR-UNS
- Kedua, melakukan training dan education Tim mitra melakukan pengenalan IPTEK yang akan diterapkan dalam PKM, tujuan penerapan IPTEK, serta melakukan analisis kebutuhan UKM mitra terkait dengan pengetahuan mereka saat ini
- Ketiga, implementasi teknologi tim mitra melakukan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi online) untuk menunjang pemasaran secara digital
- Keempat, melakukan pelatihan manajemen dan usaha, yang mencakup: motivasi usaha, inovasi dan kreativitas, dan manajemen keuangan
- Kelima, monitoring, evaluasi dan *feedback*. Tim PKM selalu memonitor selalu memberikan masukan, sebelum pelaksanaan program, pada saat pelaksanaan program, dan setelah kegiatan berlangsung sehingga dapat mengantisipasi dan memberikan masukan terkait kendala yang dihadapi mitra.
- Keenam, pelaporan dan hasil uji alat dilakukan dengan melakukan monitoring baik secara tutorial dan praktik oleh peserta yang didampingi oleh TIM Pengabdian kepada masyarakat untuk dapat mempraktikkan output atau luaran inovasi dan pengembangan alat baik dari sistem produksi maupun dalam pengemasan sehingga hal ini dapat mempermudah dalam proses kerja dan mendapatkan hasil produksi yang lebih sehingga pendapatan yang diperoleh sesuai dengan target yang diharapkan.



Melalui kegiatan pengabdian pada tanggal 23 Juni 2023, saat melaksanakan FGD ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing grup, berikut adalah rangkaian permasalahan yang telah disampaikan :

- terutama dalam bidang pengelolaan akuntansi
- manajemen pasar
- pengaruh peralihan lokasi pasar
- kurangnya pelatihan dan pendampingan penggunaan digital marketing pasar
- Perkembangan teknologi serta kurangnya perhatian pemerintah membuat keterlambatan kemajuan pasar Desa Sidomulyo.

Adanya permasalahan terkait sistem akuntansi manajemen dan juga beberapa permasalahan terkait dengan NIB (Nomor Induk Usaha) yang kebanyakan pedagang dan pengusaha anggota BUMDes masih belum memiliki juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Pasalnya, apabila banyak pedagang atau pengusaha yang mempunyai NIB maka lebih maksimal program kerja pemerintah dalam membangun wilayahnya. Kemudian, terjaminnya kepemilikan usaha bagi para pedagang dan pengusaha. Pasalnya, setiap desa mendapatkan alokasi dana desa untuk mengembangkan dan membenahi desa untuk mempercepat dan meningkatkan potensi asli desa. Semangat peningkatan ini harus dipupuk dari dini dan peran aktif masyarakat diperlukan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala terutama dalam bidang pengelolaan akuntansi manajemen pasar, pengaruh peralihan lokasi pasar, dan kurangnya pelatihan dan pendampingan penggunaan digital marketing pasar. Perkembangan teknologi serta kurangnya perhatian pemerintah membuat keterlambatan kemajuan pasar Desa Sidomulyo. Dari kegiatan pendampingan pengelolaan akuntansi manajemen scaffolding dapat membantu menunjang kemajuan BUMDes. Dari mulai adanya kegiatan pendampingan ini diharapkan ke depannya masyarakat dan pemerintah lebih peka akan beberapa target yang diharapkan. Seperti contoh akan pendemonstrasian pembuatan NIB untuk seluruh pedagang atau pengusaha anggota BUMDes demi terjaminnya usaha yang mereka usahakan. Kemudian, agar mampu terselenggarakannya program pemerintah dalam membantu meningkatkan potensi sumber daya local warga sekitar. Persiapan dalam penerapan akuntansi manajemen scaffolding juga memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang teliti, maka program pengurus BUMDes harus lebih bisa mengenalkan akan penerapan akuntansi manajemen scaffolding. Digital Marketing untuk BUMDes ini hakikatnya berbeda dengan metode pemasaran umumnya, dalam pemasaran berbasis digital, seorang penjual dapat berkomunikasi secara daring online dengan calon pembeli, sehingga saluran distribusi pemasaran dapat diakses dengan cepat dan mampu menjangkau konsumen lebih banyak untuk dapat mengakses dan mendapatkan informasi dari produk atau jasa yang ditawarkan BUMDes. Sebagai langkah pemasaran produk secara cepat, media sosial sebagai media digital marketing BUMDes dapat memberikan informasi produk atau jasa yang dimiliki BUMDes dengan beragam akses, seperti website, blog, media sosial Instagram, Facebook, Whatsapp, yang mana banyak calon pembeli yang berminat terhadap produk BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 *Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Desa*. 02 Februari 2021. Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia
- Ridlwani, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424-440.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72-81.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran sistem manajemen pada BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-40.
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 367-371.
- Rambe, N. R. S., Muda, I., & Matondang, A. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Memberdayakan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 73-80.
- Widiastuti, H., Kresnawati, E., & Utami, E. R. (2021). Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Pengembangan dan Penataan Manajemen Unit Bisnis. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 15-22.
- Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A. (2021). Peran usaha bumdes berbasis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 21(1), 47-57.
- Iskandar, J., Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1-11.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of rural and development*, 5(1).
- Hamril, H., Sarjan, A., & Arifin, S. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 4(1), 36-54.
- Rahardjo dan Ludigdo. (2006) BUMDes Sebagai Institusi Komersil, Tetap Memperhatikan Efisiensi Serta Efektivitas dalam Kegiatan Sektor Riil dan Lembaga Keuangan (berlaku sebagai LKM). *Fakultas Administrasi Publik, Malang*
- Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sayutri, M. (2011). Pelembagaan badan usaha milik desa (bumds) sebagai penggerak potensi ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten donggala. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(2), 717-728.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155-168.
- Rubiyanto, R. (2020). Pelatihan Akuntansi Dan Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes di Desa Jabontegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. *ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 222-238.
- P Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 86-100.
- P Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). Pemberdayaan pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) berdikari melalui implementasi digital marketing system. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65-75.
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(2).